

IMPLEMENTASI PROGRAM GEMA TASAMARA (GERAKAN MASYARAKAT TANGKASA NA GAMMARA) DI KABUPATEN TAKALAR

Hasriani Masiga^{1*}, Ihyani Malik², Andriana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out the implementation of the Gema Tasamara Program (Tangkasa na Gammara Community Movement) in Takalar Regency. The research method used descriptive qualitative and the instruments used observation, interviews and documentation. The number of informants in this study were 10 people. Data analysis included data reduction, data presentation and conclusion making. The results of the study showed that the implementation of the GEMA TASAMARA program in Takalar Regency in general had not been maximized in terms of major indicators, namely the content of the policy included the interests of the target group, the benefits of the program felt by the community, the degree of change to be achieved, the location of the decision makers, namely the local government was not serious. In dealing with problems related to environmental management and protection, in this case environmental hygiene, there were still piles of garbage in some areas in Takalar Regency, the program implementers were quite good, namely the Department of Environment and Land in Takalar Regency, but the resources were not adequate, then environmental indicators for implementation included the power, interests and strategies of actors who lacked socialization, characteristics of institutions and regimes that lacked communication with the community and the level of compliance of the implementers was quite good.

Keywords: implementation, program, gema tasamara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Gema Tasamara (Gerakan Masyarakat *Tangkasa na Gammara*) di Kabupaten Takalar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Gema Tasamara di Kabupaten Takalar secara umum belum maksimal ditinjau indikator besar yaitu isi kebijakan meliputi kepentingan-kepenting kelompok sasaran, manfaat dari program yang dirasakan oleh masyarakat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambil keputusan yaitu Pemerintah setempat tidak serius dalam menghadapi permasalahan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam hal ini kebersihan lingkungan masih terdapatnya tumpukan sampah di sebagian wilayah yang ada di Kabupaten Takalar, pelaksana program sudah cukup baik yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan kabupaten Takalar namun sumberdaya yang belum memadai, kemudian indikator lingkungan implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan dan startegi aktor kurang sosialisasi, karakteristik lembaga dan rezim penguasa kurang menjalin komunikasi dengan masyarakat dan tingkat kepatuhan pelaksana sudah terbilang cukup baik.

Kata kunci: implementasi, program, gema tasamara

* hasrianimasiga@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara Nasional Pemerintah sudah sangat serius terkait dengan penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah, sebagaimana dengan dibuatkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka Pemerintah membuat Peraturan Tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012.

Muatan pokok yang utama diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah ini, yaitu: Pertama, memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang wawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknik operasional, pembiayaan, kelembagaan dan sumber daya manusia. Kedua, memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peranan pada seluruh pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari Kementrian/Lembaga ditingkat pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, dunia usaha, pengelolaan kawasan sampai masyarakat. Ketiga, memberikan landasan operasional bagi implementasi 5R (*reduce, reuse, recycle, replace, replant*) atau (pengurangan, penggunaan kembali, mendaur ulang, penggantian, penanaman kembali) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang. Keempat, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibat dunia usaha untuk turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya (Sapti, 2019).

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengelolaan lingkungan hidup otomatis regulasi tersebut ditunjukkan oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Takalar. Dengan kata lain peraturan tersebut sepatutnya untuk Kabupaten Takalar memberikan

perhatian lebih terkait pengelolaan lingkungan hidup agar terciptanya efektifitas.

Pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini kebersihan lingkungan pada kenyataannya di Kabupaten Takalar seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar tahun 2020 sebanyak 300.853 jiwa. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Takalar otomatis aktivitas masyarakat mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan di wilayah tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul di Kabupaten Takalar adalah masalah sampah. Sampah yaitu berupa barang ataupun benda yang dibuang sebab tidak diinginkan lagi, yang dihasilkan dari proses industri ataupun domestik. Definisi World Health Organization (WHO) sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disukai atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari proses kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Harun, 2017).

Berdasarkan permasalahan sampah yang begitu banyak terjadi di Indonesia terkhususnya di Kabupaten Takalar membuat Bupati Takalar mengeluarkan Peraturan Daerah terkait Kebijakan dan Strategi Pemerintah

Daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Takalar diatur di dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 65 Tahun 2018. Peraturan Bupati ini menyatakan bahwa kebijakan dan strategi Daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Gema Tasamara hadir pada tahun 2018 diharapkan mampu untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat Kabupaten Takalar terhadap masalah kebersihan terkhusus pada timbunan sampah. Pengelolaan lingkungan di Kabupaten Takalar merupakan aspek yang sangat penting untuk ditinjau karena pengelolaan lingkungan di Kabupaten Takalar pada tahun 2018 telah mendapatkan penghargaan Adipura tentang pengelolaan lingkungan, ini menunjukkan adanya sebuah program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Takalar yang berhubungan langsung dengan tata kelola lingkungan. Namun pada kenyataannya setelah mendapatkan penghargaan Adipura, ternyata program Pemerintah Kabupaten Takalar

mengalami penurunan. Penurunan yang dimaksud adalah kurangnya pengawasan dan pemantauan langsung terhadap program Gema Tasamara tersebut. Hal tersebut sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat Kabupaten Takalar akan kebersihan, dilihat dari keseharian sebagian masyarakat Kabupaten Takalar yang membuang sampah tidak lagi pada tempatnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu diperuntukkan sebagai pola dasar pendukung untuk penelitian ini sebagai pembanding dari hasil penelitian untuk langkah selanjutnya. Penelitian terdahulu ini tentunya berkaitan dengan implementasi tata kelola lingkungan hidup. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian yaitu 1) Rungky Lecesnawati, Indah Prawati (2017) dengan judul penelitian “*Implementasi Program Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di RT 03 RW 03 Jombang Kota Surabaya*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: Dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif serta jenis penelitian kolerasional, menjelaskan bahwa besarnya dampak implementasi kebijakan sistem pengelolaan sampah di

Amurang Barat terkait kebersihan lingkungan ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi juga struktur birokrasi. Namun pada kenyataan yang diperoleh di lapangan menguntai masih terbilang kurang optimal dalam segi komunikasi sehingga perlunya perbaikan atau peningkatan dari segi tersebut. Di lain sisi pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada satu faktor yang menurut peneliti terbilang bagus yaitu dari dimensi disposisi. Ketika dipantau secara keseluruhan realisasi kebijakan yang dilakukan terkait pengelolaan sampah masih terbilang sedang (Alhogbi, 2017). 2) Maulidyka Agusyan Sudrajat, Daud Liando, Stefanus Sampe (2017) dengan judul penelitian “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: Penelitian yang dilakukannya menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggunakan model Van Meter dan Van Horn dalam mengukur keberhasilan implementasi program yang ditelitinya. Kebijakan di kota Manado terkait pengelolaan sampah serta retribusi kebersihan bertujuan agar menghadirkan lingkungan yang asri dan lestari sehingga memperoleh

penghargaan Adipura. Pada kenyataannya dengan model yang digunakan kinerja implementasi bisa diukur keberhasilannya apabila ukuran serta tujuan kebijakan benar-benar realistis sesuai dengan sosio-kultur pada tahap pelaksanaan kebijakan. Pada hasil yang ditemukan dilapangan menjelaskan bahwa sumberdaya dan prasarana yang dimiliki terbilang cukup baik, dilihat dari segi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sudah berusaha dengan maksimal. Dari semua aspek yang dilihat dilapangan, hanya terletak pada keterlibatan lingkungan sosial saja yang terbilang masih kurang hal ini dapat dilihat dengan kurangnya kesadaran buang sampah pada tempatnya dan jam pembuangan sampah masih sangat minim di lakukan oleh masyarakat setempat (Pelayanan et al., 2017). 3) Kadek Cahya Susila Wibawa (2019) judul penelitian “*Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris dimana dalam penelitian ini memakai pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya

merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah (negara), swasta dan masyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam aktivitas lingkungan hidup adalah ruang pengawasan. Kedua, Secara empiris pelibatan masyarakat selama ini di dalam pengelolaan lingkungan hidup baru semata-mata hanya memandang masyarakat sebagai penyampai informasi (public information) atau hanya sebatas penyuluhan sehingga suatu kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup berjalan tanpa hambatan. Kedepan, harus dilakukan optimalisasi peran serta masyarakat dalam aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu lebih ditingkatkan dengan membuka lebih luas ruang partisipasi. (Susila Wibawa, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi program tata kelola lingkungan dalam hal kebersihan yang dilakukan pada lingkup Kabupaten/Kota masih terbilang kurang maksimal disebabkan karena masih banyaknya indikator atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yang tidak dijalankan dengan baik.

Marilee S. Grindle (1980) mengemukakan definisi implementasi sebagai suatu proses yang pencapaian akhirnya dapat diukur apakah dapat tercapai atau tidak suatu tujuan yang diinginkan (Pangalila et al., 2019). Berdasarkan definisi implementasi di atas memperjelas bahwa implementasi bersurai pada mekanisme suatu sistem. Kata mekanisme berarti bahwa implementasi tidak semata-mata tentang aktivitas saja, namun juga menyangkut suatu tindakan yang terstruktur dan dilaksanakan secara betul-betul berlandaskan pada acuan tertentu dalam pencapaian tujuan kegiatan. Pada dasarnya model implementasi merupakan bentuk upaya penyederhanaan terkait realitas implementasi kebijakan yang dianggap runyam menjadi lebih sederhana yakni sebagai hubungan sebab-akibat antara keberhasilan suatu implementasi dengan variabel-variabel yang menjadi pengaruh keberhasilan implementasi tersebut.

Adapun model implementasi yang dikemukakan oleh Teori Marile S. Grindle mempercayai bahwa ada dua variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu 1) Isi Kebijakan, keberhasilan implementasi pada variabel isi kebijakan meliputi kepentingan-kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang dihasilkan

menunjukkan dampak yang positif, derajat yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, aktor pelaksana kebijakan atau program serta sumber daya yang dihasilkan. 2) Lingkungan Implementasi, Dalam variabel ini mencakup kekuasaan, kepentingan serta strategi aktor yang terlibat dalam proses implementasi, selain itu juga menyangkut karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tangkap (Subarsono, 2005). Teori atau model Marilee S. Grindle tersebut menunjukkan ada dua variabel yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dimana menekankan pada isi kebijakan yang dipercayai bahwanya dengan isi kebijakan yang baik maka akan melahirkan dampak yang positif serta variabel lingkungan implementasi juga ikut serta dalam penentuan keberhasilan implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagaimana penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975) yaitu sebagai metode penelitian yang menafsirkan data deskriptif biasanya berwujud data deskriptif dengan kata-kata tertulis ataupun dengan lisan dari orang-orang serta perbuatan (Lexy J. Moleong, 2016). Dengan tujuan untuk

mengilustrasikan tentang realitas sosial dan fenomena yang terjadi dalam implementasi program Gema Tasamara di Kabupaten Takalar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yakni menghadirkan gambaran mengenai situasi atau fenomena sosial secara detail. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan jelas terkait masalah implementasi program Gema Tasamara di Kabupaten Takalar.

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan setelah seminar proposal dilaksanakan berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) Observasi, metode ini bertujuan untuk merekam secara langsung terkait proses implementasi kebijakan program Gema Tasamara di Kabupaten Takalar 2) wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara, sesuai dengan subjek penelitian bahwa wawancara dilakukan kepada dua subjek yaitu Pemerintah Kabupaten Takalar (Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar) dan masyarakat yang berhadapan langsung dengan program Gema Tasamara. 3) Dokumentasi, sebagai alat untuk

penunjang sehingga memperkuat penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data juga dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni triangulasi sumber melakukan perbandingan dengan mengecek ulang informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. triangulasi teknik yang berbeda dan triangulasi waktu untuk mendapatkan informasi yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan terkait implementasi program Gema Tasamara (Gerakan Masyarakat *Tangkasa na Gammara*) di Kabupaten Takalar dianalisa oleh penulis dengan menggunakan teori implementasi menurut Marilee S. Grindle, yang sering disebut dengan istilah *Implementation as a Political and Administrative Process*. Dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Adapun hasil penelitian yakni:

Kepentingan-Kepentingan Kelompok Sasaran

Kepentingan kelompok sasaran merupakan meyakini bahwa suatu

kebijakan atau program dalam pengimplementasiannya tentu melibatkan banyak kepentingan serta sejauh mana kepentingan-kepentingan itu mampu membawa pengaruh terhadap implementasinya. Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Implementasi Gema Tasamara di Kabupaten Takalar ialah pelaksanaan Gema Tasamara yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. Peluang pembangunan kawasan wisata di kabupaten Takalar sangat besar sebab letak wilayahnya yang berada tidak jauh dari Kota Makassar sehingga peluang inilah yang menjadi salah satu alasan diadakannya Gema Tasamara di Kabupaten Takalar.

Tipe Manfaat

Kebijakan yang dirancang Pemerintah baik berupa program, peraturan maupun undang-undangan harus memberi hasil yang positif juga mengarahkan pada hal yang lebih baik. Setiap kebijakan tentunya diharapkan menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk membawa dalam hal yang lebih baik serta mampu meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan hadirnya Gema Tasamara di Kabupaten Takalar memberikan dampak positif kepada masyarakat

Kabupaten Takalar yaitu menjadikan sebagian wilayah di Kabupaten Takalar menjadi bersih dari sampah, selain itu dengan adanya Gema Tasamara juga hadir Pusat Daur Ulang (PDU Tasamara) yang memberikan manfaat sebagai lapangan pekerjaan terkhusus kepada masyarakat Kecamatan Gakesong Utara. Dengan adanya PDU maka terjadi proses pemilahan sampah plastik yang dapat menjadi rupiah, selain itu juga dengan adanya GEMA TASAMA maka tersedia juga pelayanan jemputan sampah dari rumah yang mempermudah masyarakat dalam pengangkutan sampah walaupun ini belum maksimal.

Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah memiliki target yang hendak dicapai dan memerlukan skala yang jelas. Setiap kebijakan diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan adanya Gema Tasamara di Kabupaten Takalar, diharapkan mampu menumbuhkan kembali sikap gotong royong masyarakat Kabupaten Takalar dalam hal kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih dan indah maka mampu menarik hati

wisatawan sebab hal yang juga diharapkan dengan adanya Gema Tasamara ialah menjadikan Kabupaten Takalar sebagai kawasan wisata.

Letak Pengambil Keputusan

Dalam implementasi kebijakan pengambilan keputusan memiliki peran penting. Letak pengambil keputusan erat kaitannya dengan *stakeholders* sebab segala keputusan yang diambil dalam melaksanakan implementasi suatu program harus disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ada. Tentunya keputusan yang diambil merupakan kepentingan bersama. Letak pengambil keputusan pada program Gema Tasamara di Kabupaten Takalar mampu menentukan tercapainya tujuan dari kebijakan atau program. Apabila pengambilan keputusan dilakukan dengan baik dan benar maka untuk mencapai tujuan dari program mampu tercapai dengan baik juga. Dalam pengambilan keputusan Pemerintah kurang tegas dalam mengambil keputusan. Dilihat permasalahan yang terjadi dalam implementasi Gema Tasamara salah satunya ialah masih ditemukannya masyarakat yang abai akan kebersihan misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak adanya umpan balik iyang diberikan

oleh Pemerintah terkait dengan hal tersebut.

Pelaksana Program

Merupakan suatu hal yang ikut berperan aktif dalam suatu kebijakan. Sebab pelaksana program merupakan penggerak atau alat yang digunakan untuk mencapai keberhasilan yang ditetapkan sebelum kebijakan dibuat. Para pelaksana program ini merupakan penyedia dan pemberi pelayanan kepada masyarakat dalam suatu kebijakan. Dalam implementasi Gema Tasamara sebenarnya bukan hanya kalangan Pemerintah saja namun semua kalangan masyarakat Kabupaten Takalar seharusnya ikut serta berepran aktif dalam pelaksanaan Gema Tasamara. Dalam pelaksanaan Gema Tasamara dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dan membentuk kader-kader kebersihan namun di lapangan ternyata kader-kader tersebut yang diharapkan sebagai pilar terdepan dalam penyelenggraan Gema Tasamara tidak maksimal dilihat dengan tidak aktifnya para kader menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang kader kebersihan.

Sumber Daya yang Digunakan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan memerlukan dukungan.

Keberadaan sumber daya yang mampu menyubangkan energi positif dan berguna untuk menyukseskan implementasi suatu program tersebut. Dengan adanya sumber daya yang cukup tentu akan membawa dampak yang baik dan sangat membantu di dalam penyelenggaraan suatu program sehingga mampu berjalan dengan maksimal baik serta efektif dan efisien. Begitupun halnya dengan Program Gema Tasamara di Kabupaten Takalar untuk memaksimalkan penyelenggarannya maka dibutuhkan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan memiliki kualitas akan membantu pengimplementasian program dengan baik dan lancar. Dalam hal ini SDM yang dibutuhkan ialah memiliki kapasitas yang sesuai serta kemampuan dan kecukupan untuk menyelenggarakan suatu program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait sumber daya dalam hal ini ialah SDM pada penyelenggaraan program Gema Tasamara terbilang masih kurang dan lemah dapat dilihat dalam pengoperasian PDU Tasamara masih banyaknya alat-alat yang ada di PDU Tasamara Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara yang sudah mulai berdebu karena tidak digunakan.

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Pada poin ini melihat sosialisasi dari program Gema Tasamara. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat pada program Gema Tasamara di Kabupaten Takalar merupakan sosialisasi terkait dengan program Gema Tasamara yang menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan yakni kebersihan lingkungan Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat umum di Kecamatan Galesong Utara mengungkapkan bahwa sosialisasi mengenai program Gema Tasamara terbilang masih kurang sebab kebanyakan masyarakat atau penduduk Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang tidak mengetahui terkait dengan program Gema Tasamara yang merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten. Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat umum di Kecamatan Galesong Utara mengungkapkan bahwa sosialisasi mengenai program Gema Tasamara terbilang masih kurang sebab kebanyakan masyarakat atau penduduk Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang tidak mengetahui terkait dengan program Gema Tasamara yang merupakan kebijakan Pemerintah

Kabupaten. Ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah dalam hal sosialisasi terbilang kurang sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat juga terbilang lemah.

Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu program atau kebijakan diselenggarakan juga memiliki pengaruh terkait keberhasilannya, pada bagian ini dijelaskan terkait karakteristik dari lembaga yang ikut berpengaruh terhadap keberhasilan program atau kebijakan. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang baik untuk menjalankan Gema Tasamara di Kabupaten Takalar tidak hanya dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan Kabupten Takalar tetapi juga masyarakat. Seperti dalam hal menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Takalar, Pemerintah terkait dengan program Gema Tasamara sebagai lembaga penguasa setempat seharusnya menyediakan sarana untuk masyarakat dalam mengelola dan menjaga lingkungannya. Namun hasil temuan di lapangan, ditemukan bahwa kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah setempat kepada

masyarakat sehingga tidak terjalin respon yang baik.

Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Pelaksana

Dalam proses penyelenggaraan suatu program maka kepatuhan dan daya respon dari pelaksana ialah hal lain yang juga dirasa penting. Sehingga disini poin inti yang hendak dijelaskan yakni sejauhmana kepatuhan serta respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan atau program Gema Tasamara Pada bagian ini merupakan bagian dari proses implementasi suatu kebijakan atau program, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para aktor pelaksana adalah bentuk aksi nyata dari pelaksana untuk menyelenggarakan tugas pokok serta fungsinya dalam mengimplementasikan program Gema Tasamara ini sehingga mampu terealisasi dengan baik, secara maksimal dan memiliki daya guna bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar cukup baik dalam menjalankan tugasnya terbukti dengan adanya penjemputan sampah oleh pihak Dinas yang turun langsung ke lapangan untuk mengangkut sampah-sampah yang ada

di penampungan sampah masyarakat tersebut.

Wilayah Administratif Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar merupakan daerah yang mempunyai 10 kecamatan dan terdiri dari 106 desa. Total dari 106 desa tersebut ada 9 desa yang tergolong dalam daerah kelurahan. 9 daerah kelurahan yang dimaksud yakni Kelurahan Pattallasang, Kelurahan Kalabbirang, Kelurahan Sombala Bella, Kelurahan Pallantikang, Kelurahan Bajeng, Kelurahan Maradekaya, Kelurahan Sabintang, Kelurahan Pappa dan Kelurahan Salaka. Adapun Kecamatan yang merupakan daerah yang mempunyai jumlah wilayah terbanyak yaitu 6 Kelurahan dan 12 Desa yaitu Kecamatan Polongbangkeng Utara sedangkan Kecamatan yang mempunyai sedikit jumlah Desa yaitu hanya 5 Desa adalah Kecamatan Kepulauan Tanakeke. Wilayah dari 10 Kecamatan tersebut, Daerah Kecamatan Terluas yaitu Kecamatan Polong Bangkeng Utara dengan luas wilayah 212,25km² atau 37,47% dari jumlah keseluruhan wilayah daerah Kabupaten Takalar sedangkan daerah yang merupakan wilayah tersempit di Kabupaten Takalar adalah Kecamatan

Kepulauan Tanakeke yaitu dengan luas 43,12km².

Dari sekian banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar namun Kecamatan Galesong Utara yang menjadi percontohan Gema Tasamara di Kabupaten Takalar selain karena PDU Tasamara yang menjadi ikon Gema Tasamara yang letaknya di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara sehingga penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Galesong Utara Desa Tamalate sebagai pusat intens program Gema Tasamara di Kabupaten Takalar.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup dan pertanian.

Adapun aturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Bupati Takalar Nomor 28 Tahun 2018 untuk melaksanakan tugas. Peraturan Bupati Takalar tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pengelolaan kebersihan dan persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar.

Kepala UPT

Adapun yang menjadi tugasnya yaitu membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan UPT Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan. Sedangkan adapun yang menjadi fungsinya yaitu perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan kebersihan dan persampahan, pelaksanaan teknik kegiatan pelayanan pengelolaan kebersihan dan persampahan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan persampahan, pelaksanaan administrasi UPT, pelaksanaan fungsi lain yang idberikan oleh kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusun program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT. Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud ialah menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, membantu,

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui pengembangan pelaksanaan tugas, menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas, mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT Sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integritasi pelaksanaan kegiatan, mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan dan penyajian data dan informasi, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan, mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan urusan keamanan pasar dan lingkungan sekitar, menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan Perundang-undangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memebrikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan tugas kedinakasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf c tentang organisasi tata kerja unit pelaksana teknis pengelolaan kebersihan dan persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar adalah jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Gema Tasamara secara umum belum berjalan baik dan maksimal masih ada ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses implementasi Gema Tasamara. Implementasi Gema Tasamara di Kabupaten Takalar dapat dilihat dari beberapa indikator implementasi menurut Marilee s. Grindle berikut ini: 1) Isi Kebijakan Dalam Variabel isi kebijakan terdapat beberapa dimensi yakni: a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi Indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi Gema Tasamara di Kabupaten Takalar ialah pelaksanaan

implementasinya masih terdapat kekurangan karena kurangnya keterlibatan masyarakat, b. Tipe manfaat yang diperoleh manfaat dari kebijakan Implementasi Gema Tasamara di Kabupaten Takalar sudah dirasakan oleh masyarakat walaupun tidak keseluruhan. Adapun manfaatnya yang dirasakan dengan Gema Tasamara yakni memberikan lapangan kerja yang disediakan oleh PDU Tasamara, selain itu manfaat lainnya adalah tersedianya layanan penjemputan sampah oleh satgas kebersihan walaupun ini belum merata keseluruhan. Manfaat utama dengan adanya Gema Tasamara. c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan, peimplementasian program Gema Tasamara terkait derajat perubahan yang diinginkan mengharapkan masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan sehingga menjadikan wilayah Kabupaten Takalar menjadi bersih dan indah sehingga dapat dijadikan kawasan wisata di bagian selatan Kota makassar. Selain itu derajat perubahan yang diinginkan dengan adanya Gema Tasamara adalah menjadikan Kabupaten Taklaar menjadi Kabupaten yang meraih penghargaan atau sertifikat Adipura dan ini sudah terealisasikan pada tahun 2018. d. Letak Pengambil Keputusan, bahwa dari Pemerintah setempat tidak terlalu serius

memikirkan persoalan kebersihan. Namun tetap ada usaha yang dilakukan oleh Pemerintah setempat dan Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan Kabupaten Takalar. e. Pelaksana program, implementasi Gema Tasamara di Kabupaten Takalar adalah Pemerintah kabupaten Takalar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar yang kemudian membentuk kader kebersihan sebagai pilar terdepan dalam mengayomi masyarakat. Namun sejatinya pelaksana program Gema Tasamara di kabupaten Takalar melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengikut seratakan diri dalam menyukseskan Gerakan Masyarakat *Tangkasa* na *Gammara* sehingga menjadikan wilayah bersih dan indah. f. Sumberdaya. Sumberdaya dalam implementasi program Gema Tasamara di kabupaten Takalar terbilang belum memadai dilihat dalam pengelolaan PDU Tasamara yang dimana merupakan *icon* Gema Tasamara. Dalam PDU terdapat banyak alat pemilahan sampah yang tidak lagi dimanfaatkan dengan baik bukan karena alatnya yang sudah rusak namun karena tidak adanya SDM yang mampu mengoperasikannya. 2) Lingkungan Implementasi. a. Kekuasaan, Kepentingan dan strategi

aktor yang Terlibat, strategi yang digunakan dalam hal ini adalah sosialisasi. Namun masih kurangnya dan belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan para pelaksana dalam implementasi program Gema Tasamara di Kabupaten Takalar. Buktinya adalah mayoritas masyarakat Kabupaten Takalar belum mengetahui terkait dengan Gema Tasamara di kabupaten Takalar. b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dengan Pemerintah setempat yakni Kecamatan Galesong Utara telah memberikan pengaruh pada implementasi Gema Tasamara. Karakteristik lembaga dan penguasa di Desa Tamalate Kecamatan galesong Utara kurang memberikan dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui penyediaan sarana. c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Gema Tasamara sudah terbilang baik dan sudah sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhogbi, B. G. (2017a). Implementasi Program Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di RT 03 RW 03 Jombang Kota Surabaya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/science>
- Harun, H. (2017). Gambaran Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Dalam Proses Pemilahan Sampah Rumah Tangga Di Desa Hegarmanah. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(2), 86–88. <http://journal.unpad.ac.id/dharma-karya/article/view/14789/7890>
- Lexy J. Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pangalila, Y., Kaawoan, J., Kumayas, N., Kesehatan, H. D., Seksi, K., Kesehatan, P., Sub, K., Umum, B., Bidang, K., Pendidikan, P., Pendidikan, D., Timur, T., Tengah, T., & Selatan, T. (2019). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. *Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kota Tomohon*, 3(3), 1–9.
- Pelayanan, R., Di, K., & Manado, K. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sapti, M. (2019). Metode Yuridis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Di STT-PLN. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>